

**SERAPAN DANA DESA UNTUK MENINGKATKAN PERAN
SERTA MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA
BANJARAN, TAMAN, PEMALANG**



**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Program Studi Strata I
Pada Program Studi Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan Dan Ilmu
Pendidikan**

Oleh:

**PRAWITA PRAWEDYARINI
A210160263**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AKUNTANSI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2020

HALAMAN PERSETUJUAN

SERAPAN DANA DESA UNTUK MENINGKATKAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA BANJARAN, TAMAN, PEMALANG

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

Prawita Prawedyarini

A210160263

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



Agus Susilo, S.Pd., M.Pd

NIDN. 06-2504-8901

HALAMAN PENGESAHAN

SERAPAN DANA DESA UNTUK MENINGKATKAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA BANJARAN, TAMAN, PEMALANG

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Prawita Prawedyarini

A210160263

Telah di pertahankan di depan Dewan Penguji

pada Hari/Tanggal: 6 November 2020

dan dinyatakan telah memenuhi syarat.

Susunan Dewan Penguji

1. Agus Susilo, S.Pd., M.Pd.

(Ketua Dewan Penguji)

2. M. Fahmi Johan Syah, M.Pd.

(Anggota I Dewan Penguji)

3. Prof. Dr. Harsono, SU.

(Anggota II Dewan Penguji)

(.....)
(.....)
(.....)

Surakarta, 6 November 2020

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Dekan,



Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, M.Hum

NIDN. 00-2804-6501

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang sebelumnya pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi manapun, dan belum pernah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis berpacu dalam naskah dan dalam daftar pustaka.

Saya bertanggung jawab apabila dikemudian hari naskah saya terbukti telah plagiat hasil orang lain. Dan saya juga akan bersedia menerima sanksi sesuai hukum yang berlaku.

Surakarta, 6 November 2020

Yang membuat pernyataan,



Prawita Prawedyarini

A210160265

SERAPAN DANA DESA UNTUK MENINGKATKAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA BANJARAN, TAMAN, PEMALANG

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengelolaan dana desa, serapan dana desa untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa, kendala-kendala dalam meningkat peran masyarakat, dan solusi dari kendala-kendala meningkatkan peran serta masyarakat. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan desain penelitian etnografi. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Keabsahan data yang digunakan dalam penelitian menggunakan triangulasi data. Teknik analisis data menggunakan analisis data model pengembangan penelitian etnografi menurut Spradley. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pengelolaan dana desa dilakukan dengan prosedurnya dan sesuai peraturan pemerintah yang berlaku berdasarkan asas – asas pengelolaan keuangan desa yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. 2) Prioritas dalam serapan dana desa adalah meningkatkan pembangunan desa, dengan meningkatkan pembangunan desa masyarakat dapat lebih sejahtera sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat. Adanya musyawarah-musyawarah desa dan swadaya masyarakat menjadikan masyarakat sadar akan pentingnya meningkatkan pembangunan desa. 3) Kendala terdapat pada masyarakat kurang memahami dengan baik dan benar mengenai dana desa. Pembangunan yang diinginkan masyarakat tidak sebanding dengan anggaran yang dimiliki desa. 4) Solusinya pemerintah desa melakukan sosialisasi kebijakan-kebijakan yang berlaku dalam pengelolaan dana desa dan memperbanyak papan informasi di setiap sudut dusun agar mudah terjangkau oleh masyarakat.

Kata kunci : Dana Desa, Masyarakat, Pembangunan Desa

Abstract

This study aims to described the management of village funds, the absorption of village funds to increase community participation in village development, the obstacles in increased role of the community, and the solution of the constraints increase active role of public.. This type of research uses qualitative research with ethnographic research design. Data collection techniques using interviews, observation, and documentation. The validity of the data used in the study used data triangulation. Data analysis technique using analysis model of ethnography according to research data spradley. The results showed that 1) The management of village funds was carried out according to the procedure and in accordance with applicable government regulations based on the principles of village financial management, namely transparent, accountable, participatory, orderly and budgetary discipline. 2) The priority in the absorption of village funds is to increase village development, by increasing village development the community can be more prosperous. The existence of village deliberations and community self-help makes the community aware of the importance of increasing village development so that it can increase community participation 3) Constraints exist

in the community who do not understand well and correctly about village funds. The development that the community wants is not proportional to the budget owned by the village. 4) The solution is that the village government disseminates policies that apply in the management of village funds and reproduces information boards in every corner of the hamlet so that they are easily accessible to the community.

Key words: Village Fund, Community, Village Developme

1. PENDAHULUAN

Indonesia saat ini menganut sistem pemerintahan desentralisasi, sistem pemerintahan desentralisasi yang memberikan wewenangya kepada pemerintah daerah untuk menanggulangi pembangunan yang tidak merata dan meningkatkan fungsi-fungsi pelayanan pemerintahan kepada masyarakat. Dengan adanya sistem pemerintahan desentralisasi desa-desa di Indonesia menjadikan pembangunan sebagai prioritasnya.

Pembangunan desa merupakan suatu bagian yang terpenting dalam menentukan keberhasilan dari pembangunan nasional. Kesuksesan pembangunan desa nantinya akan berimbas pada keberhasilan pembangunan nasional secara keseluruhan. Menurut Dirjen PMD dalam (Ardilah et al., 2011) bahwa “Seluruh proses kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa/kelurahan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari pembangunan nasional yang mencakup seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat. Pembangunan ini dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong dari masyarakat”.

Dengan demikian pembangunan desa perlu adanya peran dari masyarakat untuk berupaya meningkatkan pembangunan desa. Partisipasi masyarakat menjadi komponen terpenting dalam tercapainya tujuan pembangunan desa. Pembangunan akan menjadi tidak efektif jika kurangnya dukungan dan pasifnya partisipasi masyarakat, sehingga pembangunan tidak akan mencapai target yang dituju.

Saat ini Pemerintah Indonesia melalui nawacita berkomitmen untuk membangun Indonesia dari pinggiran, di antaranya dengan meningkatkan

pembangunan di desa. Dengan adanya program dana desa diharapkan desa - desa untuk berkesempatan mengembangkan ekonomi masyarakat serta mensejahterakan masyarakat dalam membangun desa untuk lebih maju. Program dana desa ini bukan hanya yang pertama di Indonesia, namun juga yang pertama dan terbesar di seluruh dunia.

Pengelolaan keuangan desa tentunya harus dilakukan dengan manajemen yang baik dan akuntabel karena dana yang masuk ke desa bukanlah dana yang kecil, melainkan sangat besar untuk dikelola oleh sebuah pemerintahan desa. Dengan adanya kebijakan dana desa tersebut, maka dimensi manajemen pada pelaksanaan kebijakan dana desa tersebut perlu untuk diterapkan dengan baik (Nurhayati, 2017).

Menurut Sofianto (2017) sasaran penggunaan dana desa adalah untuk memperbaiki kehidupan masyarakat desa, terutama dalam segi ekonomi, sosial, budaya dan politik. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu aspek utama dari penggunaan dana desa. Penggunaan dana desa dirumuskan dalam musyawarah desa, serta alokasi anggaran dimasukkan dalam APBDDesa. Jika masyarakat menginginkan penggunaan di luar ketentuan tersebut, dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan bupati (Peraturan Menteri Keuangan No 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa, 2015).

Hal yang terpenting dalam pengelolaan dana desa adalah peran serta masyarakat dalam keikutsertaan proses pembangunan desa. Masyarakat Desa merupakan bagian dari sasaran pembangunan nasional. Untuk menunjang kesejahteraan masyarakat desa, desa mendapatkan dana bagi hasil dari pemerintah kabupaten sebagai bentuk pendapatan desa yang berbentuk anggaran dana desa (Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2017). Dengan melibatkan keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan pembangunan desa yang dilakukan dengan pola swakelola artinya bahwa kegiatan dilakukan dengan cara mandiri oleh desa. Kegiatan swakelola yang lakukan dalam pembangunan seperti menggunakan tenaga

kerja setempat dan menggunakan bahan baku lokal yang ada desa, sehingga uang yang digunakan dalam kegiatan tersebut tidak ada akan mengalir keluar. Adanya keikutsertaan masyarakat diharapkan dapat menyerap tenaga kerja dan memberikan pendapatan kepada masyarakat.

Dalam pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 66 tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, karakteristik pembangunan partisipatif diantaranya direncanakan dengan pemberdayaan dan partisipatif. Pemberdayaan, yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sedangkan partisipatif, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan.

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini antara lain: (1) untuk mendeskripsikan pengelolaan dana desa Banjaran, (2) untuk mendeskripsikan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa, (3) kendala-kendala dari serapan dana desa untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan, dan (4) solusi dari kendala-kendala serapan dana desa untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif dengan desain etnografi. Penelitian dilakukan di Desa Banjaran, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang pada bulan Juli 2020. Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat Banjaran. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk mengamati serapan dana desa secara langsung sehingga dapat diketahui pengaruhnya terhadap peran serta masyarakat dalam pembangunan, sedangkan wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mendalam dari seluruh narasumber dan dokumentasi dalam penelitian ini berupa foto atau dokumen penunjang penelitian. Selanjutnya keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi sumber dan triangulasi metode. Teknik analisis data pada

penelitian ini menggunakan pengembangan penelitian etnografis menurut Spradley dalam (Harsono, 2019: 145).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan dana desa di Banjaran dikelola dengan asas-asas pengelolaan keuangan desa yaitu (1) transparan artinya pemerintah desa Banjaran telah menjamin ketransparansiannya dalam pengelolaan dana desa pada seluruh masyarakat desa Banjaran, dengan adanya banner atau papan informasi yang berisi rincian sumber dana dari APBDes dan rincian penggunaannya, dari situ masyarakat dapat membacanya dan mengetahui rincian penggunaan anggaran-anggaran pendapatan desa dengan jelas, (2) akuntabel artinya pemerintah desa Banjaran dalam melakukan pengelolaan dana desa memiliki wewenang melakukan pertanggungjawaban disetiap perencanaan penggunaan anggaran desa serta kegiatan penggunaan anggaran desa, (3) partisipatif artinya pemerintah desa dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan dana desa selalu melibatkan lembaga desa seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan juga melibatkan masyarakat/tokoh masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya melalui kegiatan musyawarah desa, dan (4) tertib dan disiplin anggaran artinya pemerintah desa Banjaran melakukan pencatatan dalam setiap penggunaan anggaran desa dengan menyesuaikan serta menerapkan peraturan-peraturan yang berlaku.

Dalam pengelolaannya, Badan Perwakilan Desa (BPD) berperan sebagai pengawas jalannya pengelolaan dana desa dan kegiatan serapan dana desa mulai dari perencanaan yaitu diadakannya musyawarah dusun (musdus), musyawarah desa (musdes) dan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) untuk menghasilkan prioritas pembangunan desa. Selain itu BPD juga bertindak melakukan pengawasan saat

dilakukannya pelaksanaan pembangunan dan bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa. Sejalan dengan penelitian Roza & S (2018) menyatakan bahwa BPD bukanlah lembaga yang dapat dengan begitu saja disepelekan, melainkan kepala desa harus senantiasa bekerja sama dengan BPD dalam pembangunan desa. Akhir penulisan ini menjelaskan tentang pengawasan keuangan yang dilakukan oleh BPD. Pelaksanaan pengawasan juga dapat mendeteksi, sejauh mana kebijakan kepala desa untuk menjalankan dan penyimpangan keuangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut. Tulisan ini juga menegaskan bahwa faktor yang dapat mendukung pengawasan BPD adalah masyarakat, karena masyarakat merupakan faktor penentu keberhasilan BPD dalam melaksanakan pengawasan keuangan desa.

3.2 Serapan Dana Desa Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Banjaran

Serapan dana desa yang baik menjadi bagian terpenting dalam membangun desa dan mensejahterakan masyarakat dalam bidang perekonomian, pendidikan serta kesehatan. Prioritas utama serapan dana di Banjaran adalah meningkatkan pembangunan desa. Upaya meningkatkan pembangunan desa ini tidak lepas dari keikutsertaan masyarakat berpartisipasi dan menundukung meningkatkan pembangunan desa. Seperti yang di ungkapkan oleh Sofianto (2017) yaitu pada umumnya masyarakat dan pemerintah desa merasa cukup terbantu karena dana desa memberikan sumbangan yang cukup berarti bagi pembangunan desa, baik dari segi perekonomian, sosial dan politik. Dari segi ekonomi semakin terbukanya aksesibilitas dan meningkatnya efisiensi. Adapun manfaat sosial memperkuat modal sosial, dengan menumbuhkan kembali semangat persatuan/kebersamaan dan gotong royong dalam pembangunan. Dalam bidang politik, memberikan peluang besar pada partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Secara tidak langsung dana desa turut menciptakan demokrasi di kalangan bawah,

peningkatan partisipasi serta suasana politik yang kondusif, hanya saja suara perempuan belum begitu diperhatikan.

Pertumbuhan ekonomi pedesaan adalah suatu proses yang dilakukan masyarakat dalam mengelola sumberdaya yang ada di desa dengan membentuk suatu pola kemitraan dengan pemerintah maupun swasta yang ditandai adanya industri *propulsive* tertentu dengan tujuan menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan ekonomi pedesaan (Asmawati & Supriyono, 2015).

Berdasarkan penelitian bahwa partisipasi masyarakat desa Banjarnegara akan pembangunan desa sangat baik, terbukti dengan aktifnya partisipasi masyarakat mengikuti musyawarah dusun (musdus), musyawarah desa (musdes), musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang diselenggarakan oleh pemerintah desa. Musyawarah ini diselenggarakan sebagai forum antara pemerintah desa, lembaga desa, Badan Permasyarakatan Desa (BPD), masyarakat dan tokoh masyarakat untuk memutuskan atau merencanakan pembangunan desa. Sedangkan pada saat pelaksanaan pembangunan, bentuk partisipasi masyarakat Banjarnegara adalah berupa swadaya masyarakat. Swadaya masyarakat ini dilakukan dengan cara gotong royong membantu dalam hal fisik maupun non-fisik, pembantuan fisik seperti berupa bantuan tenaga sedangkan non-fisik berupa penunjang kegiatan pembangunan yaitu seperti penyediaan makanan bagi pekerja. Selain partisipasi berupa swadaya, masyarakat Banjarnegara juga turut aktif melakukan pengawasan jalannya pembangunan desa. Pengawasan masyarakat dimaksudkan agar masyarakat secara jelas mengetahui prosesnya pembangunan itu berjalan serta sebagai antisipasi tindakan penyimpangan pada proses pembangunan desa. Seperti yang dikemukakan oleh Sofianto (2017) yaitu perhatian terhadap kepentingan desa melalui dana desa telah mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Gerakan sosial warga tumbuh kembali dalam bentuk kegiatan gotong royong dan kerja bakti.

Pembuatan jalan, jembatan dan perbaikan saluran irigasi dilandasi semangat gotong royong dan keswadayaan. Dengan kegiatan yang berbasis gotong royong, masyarakat semakin sadar, berbagai permasalahan desa dapat berjalan dengan lancar dan mudah diatasi.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Tertinggal, dan transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 pasal 21 Bab VII tentang Partisipasi Masyarakat, masyarakat dapat ikut serta memantau dan mengawasi penetapan prioritas penggunaan dana desa yang akuntabel dan transparan dengan cara sebagai berikut 1) Menyampaikan pengaduan masalah penetapan prioritas penggunaan dana desa; 2) Melakukan pendampingan kepada desa dalam menetapkan prioritas penggunaan dana desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan/ atau 3) Melakukan studi dan publikasi penerapan prioritas penggunaan dana desa (Bawono & Erwin, 2019).

Selain itu pemerintah desa Banjaran juga melakukan penyerapan dana desa yang digunakan untuk membiayai jalannya kegiatan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Pembinaan kemasyarakatan itu berupa seperti pelatihan supir, pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), dukungan pembinaan KAMTIBMAS, pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) serta Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Sedangkan dalam pemberdayaan masyarakat berupa peningkatan aparatur desa, pemberdayaan perempuan, promosi produk unggul desa, dukungan penanaman modal, rehabilitasi kios desa dan penambahan modal BUMDes. Tujuan dari diadakannya pembinaan masyarakat serta pemberdayaan masyarakat di Banjaran sebagai bentuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar.

3.3 Kendala-kendala dalam Proses Penyerapan Dana Desa untuk Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan Desa Banjaran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, mengemukakan bahwa kendala-kendala yang terjadi saat proses penyerapan dana desa sebagai bentuk peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa Banjaran adalah masyarakat desa Banjaran tidak keseluruhannya aktif berpartisipasi dalam pembangunan namun juga masih banyak masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam pembangunan desa. Beberapa masyarakat juga masih belum sepenuhnya memahami apa itu dana desa dengan baik dan benar. Keinginan masyarakat pada peningkatan pembangunan desa terkandung tidak sesuai dengan anggaran yang dimiliki oleh desa. Oleh sebab itu penyelenggaraan musyawarah-musyawarah yang ada di desa bersifat wajib dan penting sebagai sarana menentukan prioritas pembangunan desa. Tahap perencanaan dan pelaksanaan keuangan desa, menunjukkan bahwa proses perencanaan dilakukan secara terbuka dan melibatkan masyarakat dalam menyerap aspirasi dalam bentuk Musrenbangdesa. Sedangkan pada tahap pelaksanaan keuangan desa, masih terdapat beberapa kendala yang disebabkan karena terbatasnya sumber daya manusia yang benar benar memahami secara menyeluruh terkait pelaksanaan keuangan desa, beserta aturan pelaksanaan terkait (Boedijono et al., 2019).

Kendala juga dialami terkait dengan kapasitas desa. Untuk itu demi kelancaran implementasi dan menanggapi kurangnya kualitas SDM diharapkan ada pembinaan dari pemerintah baik pusat maupun daerah. Hal ini sangat dibutuhkan mengingat penggunaan dana desa rawan penyelewengan dan kesalahan prosedur, karena SDM yang belum terbiasa dan adanya tuntutan yang kuat dari masyarakat terkait penggunaan dana desa. Untuk ini pemerintah dapat mengoptimalkan

aparatur kecamatan dan pendamping desa agar lebih giat melakukan pendampingan (Sofianto, 2017).

3.4 Solusi Kendala-kendala dalam Proses Penyerapan Dana Desa untuk Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan Desa

Solusi dari kendala-kendala yang terjadi dalam proses penyerapan dana desa untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa yaitu pemerintah desa hendaknya dapat mensosialisasikan dana desa kepada masyarakat serta memperbanyak pengadaan papan informasi dan banner mengenai APBDes atau informasi terkait pembangunan desa di setiap dusunnya, sehingga masyarakat dengan mudah dapat memahami dan mengetahuinya. Masyarakat Banjaran mengharapkan pembangunan desa semakin meningkat di setiap dusunnya. Pemerintah desa hendaknya bijak dalam memberikan kebijakan-kebijakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini relevan dengan penelitian Rianti & Roekhudin, (2019) yaitu Pemerintah Desa sebagai pengelola dan pemangku kebijakan di desa harus dapat menyelenggarakan pengelolaan secara profesional, efektif dan efisien, serta akuntabel yang didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen publik yang baik agar terhindarkan dari tindakan yang kurang bermoral seperti penyimpangan, penggelapan, penyelewengan, dan tindakan korupsi lainnya. Pengelolaan keuangan meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Ardilah, Makmur, & Hanafi (2011) menjelaskan bahwa upaya kepala desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa yaitu pertama, memberikan motivasi, motivasi dalam hal pembangunan desa sangat diperlukan dalam rangka menggerakkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan di desanya. Seorang Kepala Desa selaku pemimpin formal di desa harus mampu menggerakkan, mendorong dan memberikan motivasi kepada

masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan, karena tujuan dari pembangunan itu tidak akan dapat terwujud apabila tidak ada keterlibatan masyarakat didalamnya. Motivasi adalah sebagai keseluruhan proses pemberian dorongan bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa sehingga mereka mau bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis (Siagian, 2007, hal.106). Kedua, melaksanakan koordinasi dan komunikasi, koordinasi mutlak diperlukan dalam sebuah organisasi, karena organisasi merupakan pelaksana fungsi manajemen dari seorang pemimpin dalam rangka menghimpun orang-orang, materi dan metode untuk bekerjasama ke arah pencapaian tujuan. Sebelum mengkoordinasi setiap kegiatan yang ada kaitannya dengan program pembangunan yang akan dilakukan di desa, maka terlebih dahulu Kepala Desa mengkomunikasikan dengan perwakilan desa untuk membahas kegiatan yang akan dilakukan. Ketiga, melaksanakan tugas pengawasan, pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Pengawasan dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu organisasi di dalam melaksanakan program-program yang telah direncanakan, apakah di dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan apa yang direncanakan ataukah belum.

4. PENUTUP

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti pada serapan dana desa untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa Banjaran dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : Pengelolaan dana desa di Banjaran dikelola oleh pemerintah dengan baik dan benar berdasarkan asas - asas pengelolaan keuangan desa yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Ketransparansian pemerintah desa akan pengelolaan dana desa tertuang pada papan informasi atau *banner* yang memaparkan APBDes tiap

tahunnya sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengetahuinya. Bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa akan pengelolaan dana desa adalah dengan adanya penyusunan laporan realisasi pelaksanaan APBDes, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes dan melakukan pembukuan disetiap transaksi keuangan yang dilakukan desa. Badan Perwakilan Desa memiliki wewenang dalam pengelolaan dana desa adalah sebagai pengawas jalannya perencanaan hingga pengelolaan dana desa. Serapan dana desa di Banjarn menjadi pembangunan desa sebagai skala prioritas untuk kesejahteraan masyarakat desa Banjarn. Dengan ketransparansian pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa dan keterbukaan memberikan ruang untuk masyarakat mengaspirasikan suaranya, mengakibatkan masyarakat Banjarn sadar akan pentingnya meningkat pembangunan desa. Antusias masyarakat Banjarn cukup baik terbukti dengan andilnya masyarakat dalam kegiatan musyawarah yang diselenggarakan desa. Masyarakat juga berperan serta dalam swadaya masyarakat baik fisik maupun non fisik, melakukan gotong royong dan aktifya kader-kader desa berperan serta dalam meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan desa. Kendala dalam proses penyerapan dana desa untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa Banjarn tidak terlalu memiliki kendala yang signifikan. Yang menjadi kendala adalah tidak semua masyarakat desa Banjarn paham dan mengerti mengenai dana desa dengan baik. Kemudian kendala lain adalah jumlah anggaran desa tidak sebanding dengan pembangunan yang diinginkan oleh masyarakat. Solusi dari kendala yang terjadi saat proses penyerapan dana desa untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa yaitu dengan memperbanyak lagi papan informasi atau *banner* APBDes disetiap sudut dusun sehingga masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi dan mengetahuinya. Serta pemerintah desa dapat melakukan sosialisasi langsung mengenai pengelolaan dana desa serta kebijakan – kebijakan yang berlaku saat pengelolaan dana desa sehingga .

Berdasarkan kesimpulan yang didapat, maka saran yang diberikan dalam serapan dana desa untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa Banjarn adalah sebagai berikut : Pemerintah desa Banjarn

perlu melakukan sosialisasi kebijakan-kebijakan pengelolaan dana desa dan prioritas penggunaan dana desa kepada masyarakat. Sehingga usulan-usulan yang diberikan oleh masyarakat dapat terarah sesuai porsi dana desa. Badan Perwakilan Desa memberikan pengawasan lebih terhadap pemerintah desa dalam mengelola dana desa agar tetap mempertahankan pengelolaan dana desa yang transparansi dan akuntabel sehingga dapat menjaga stabilitas keuangan desa. Diharapkan pembangunan-pembangunan desa Banjarnegara dapat merata di setiap dusunnya dan dapat meningkatkan pembangunan desa serta meningkatkan fasilitas penunjang kebutuhan masyarakat. Masyarakat desa Banjarnegara dapat lebih meningkatkan partisipasinya dalam pembangunan desa, sehingga pembangunan desa Banjarnegara dapat lebih maju dan kesejahteraan masyarakat Banjarnegara akan lebih baik lagi dari sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardilah, T., Makmur, M., & Hanafi, I. (2011). Upaya Kepala Desa untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa (Studi di Desa Bareng Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 2(1), 71–77.
- Asmawati, T., & Supriyono. (2015). Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Sebagai Upaya Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Pedesaan di Masyarakat Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri. *Membangun Daya Saing Bangsa*.
- Boedijono, B., Wicaksono, G., Puspita, Y., Bidhari, S. C., Kusumaningrum, N. D., & Asmandani, V. (2019). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kabupaten Bondowoso. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*, 4(1), 9–20. <https://doi.org/10.36226/jrmb.v4i1.237>
- Bawono, I.R, & Erwin, S. (2019). *Panduan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa*. Grasindo.
- Harsono. (2019). Metode Penelitian Pendidikan. Sukoharjo: Jasmine.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2017). Buku Pintar Dana Desa. In *Buku Pintar Dana Desa*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.kemenkeu.go.id/media/6749/buku-pintar-dana-desa.pdf>
- Nurhayati, D. (2017). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Pendidikan Ekonomi, Kewirausahaan, Bisnis, Dan Manajemen (JPEKBM)*,

I(2), 1–12.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa. (2007). Republik Indonesia.

Rianti, P., & Roekhudin. (2019). Implementasi Pengelolaan Keuangan Dana Desa yang Bersumber dari APBN 2015 (Studi pada Desa Tunjungtirta Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

Roza, D., & S, L. A. (2018). Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa. *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 4(3), 606–624. <https://doi.org/10.22304/pjih.v4n3.a10>

Sofianto, A. (2017). Kontribusi Dana Desa terhadap Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kebumen dan Pekalongan. *Matra Pembaruan*, 1(1), 23–32. <https://doi.org/10.21787/mp.1.1.2017.23-32>